

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500185576000

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BERKAT ELEKTRINDO SEJAHTERA
Alamat : GREEN PURI 6 JL KRESEK RAYA NO.26, RT 000, RW 000, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 #0932377641124000000000
NPWP : 0932377641124000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: pt.best@harmonisasipajak.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	940500	Linear Connector(L-N)-BK Rp 9.513,50 x 23,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	218.810,50
2	940500	RS22 LED tracklight(2 wires) 30W 6500K 24D BK Rp 164.324,32 x 20,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.286.486,40
3	940500	2 Wires (L-N) Track-1 meter BK Rp 38.918,92 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	934.054,08
4	940500	CLL16 LED linear light 26W6 500K Rp 99.891,89 x 43,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.295.351,27
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			8.734.702,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			8.006.810,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			960.817,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 26 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250624-0004)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2